Besti Rohana Simbolon, S.Sos, M.Si Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos, M.Si





Editor:

Bantors Sthombing, S.Sos, M.St







- eurekamediaaksara@gmail.com
 Ul. Banjaran RT.20 RW.10
- Bojongsari Purbalingga 53362





KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

Besti Rohana Simbolon, S.Sos, M.Si Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos, M.Si



KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

Penulis : Besti Rohana Simbolon, S.Sos, M.Si

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos, M.Si

Editor : Bantors Sihombing, S.Sos, M.Si

Desain Sampul : Satria Panji Pradana

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-487-495-2

No. HKI : EC002022111473

Diterbitkan oleh: EUREKA MEDIA AKSARA,

DESEMBER 2022

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku "Komunikasi Pemerintahan dalam Pembangunan Desa" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Adapun buku ini terdiri dari tujuh bab, yaitu bab 1 tentang ruang lingkup komunikasi, bab 2 tentang organisasi pemerintahan, bab 3 tentang komunikasi organisasi pemerintahan, bab 4 tentang tata kelola pemerintahan yang baik, bab 5 komunikasi pemerintahan, bab 6 tentang model komunikasi pemerintahan, dan bab 7 tentang komunikasi pemerintahan dalam pembangunan desa.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	iii
DAFT	AR ISI	iv
BAB 1	RUANG LINGKUP KOMUNIKASI	1
	A. Pengertian dan Definisi Komunikasi	1
	B. Unsur-Unsur Komunikasi	9
	C. Fungsi Komunikasi	17
	D. Proses Komunikasi	25
	E. Hambatan Komunikasi	33
	F. Strategi Komunikasi	38
BAB 2	ORGANISASI PEMERINTAHAN	42
	A. Pengertian Pemerintahan	42
	B. Pengertian Organisasi dan Tujuan Pemerintahan	47
	C. Karakteristik Organisasi Pemerintahan	55
	D. Bentuk-Bentuk Pemerintahan	58
	E. Manajemen Pemerintahan	62
BAB 3	KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN	70
	A. Pengertian Komunikasi Organisasi	70
	B. Fungsi Komunikasi Organisasi	75
	C. Gaya Komunikasi Organisasi	77
	D. Saluran Komunikasi Organisasi	80
	E. Iklim Komunikasi Organisasi	
BAB 4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	92
	A. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan	92
	B. Pengembangan E-Government Menuju Good	
	Governance	98
	C. Penerapan Good Governance Menurut Undang-	
	Undang	110
BAB 5	KOMUNIKASI PEMERINTAHAN	
	A. Definisi Komunikasi Pemerintahan	115
	B. Karakteristik Komunikasi Pemerintahan	118
	C. Fungsi Komunikasi Pemerintahan	
	D. Hambatan dalam Komunikasi Pemerintahan	131
	E. Strategi Mencapai Komunikasi Pemerintahan yang	
	Efektif	134

BAB 6	MODEL KOMUNIKASI PEMERINTAHAN 139)
	A. Pengertian Model Komunikasi)
	B. Model S-R	Ł
	C. Model Aristoteles	5
	D. Model Komunikasi Lasswell	ó
	E. Model Shannon dan Weaver147	7
	F. Model Berlo	3
	G. Komunikasi Internal Instansi Pemerintahan149)
	H. Komunikasi Eksternal Instansi Pemerintahan 154	Ł
	I. Media Komunikasi dalam Komunikasi	
	Pemerintahan	5
BAB 7	KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM	
	PEMBANGUNAN DESA159)
	A. Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa159)
	B. Komunikasi Pemerintahan Dalam Perencanaan	
	Pembangunan Sesuai SDGs Desa165	5
	C. Komunikasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa	
	Bertah	L
	D. Komunikasi Pemerintah Desa dan Pendamping Desa	
	Dalam Penguatan Lembaga Desa Sukseskan	
	Pembangunan177	7
	E. Perencanaan dan Model Komunikasi Pemerintahan	
	dalam Peningkatan Kapasitas Desa Membangun Desa	
	Bertah	Į
	F. Komunikasi Pemerintah Desa Bertah Dalam	
	Pembangunan Tingkatkan Respon dan Partisipasi	
	Masyarakat196	ó
	G. Komunikasi Pemerintahan Dalam Strategi	
	Pemerintahan Jokowi Selama 2 Periode)
DAFT	AR PUSTAKA212	<u> </u>
TENTA	ANG PENULIS219)



UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada LPDP dan Kemdikbudristek yg telah mendukung terbitnya Buku ini



1

RUANG LINGKUP KOMUNIKASI

A. Pengertian dan Definisi Komunikasi

Komunikasi merupakan proses aktivitas yang paling mendasar dilakukan dalam kehidupan manusia. Komunikasi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam interaksi yang terjadi setiap harinya. Drucker, seorang analis manajemen Amerika telah meneliti bahwa di negara-negara yang sudah maju, masyarakatnya menghabiskan uang setiap harinya tidak hanya untuk belanja sandang, dan pangan tetapi juga untuk membeli kebutuhan dalam berkomunikasi (Cangara, 2012)1. Komunikasi membangun hubungan antar manusia baik dari beragam golongan, umur, kepentingan maupun jarak. Semua manusia dapat menunjukkan keberadaan dirinya dengan memahami kehendak, sikap, dan perilaku yang ditunjukkan komunikasi. Pengaruh Komunikasi dalam meningkatkan cakrawala berpikir seseorang menjadi semakin luas. Komunikasi juga dapat meningkatkan keharmonisan dalam hubungan antarmanusia, tetapi dapat juga menimbulkan perang antar bangsa. Oleh karena itu komunikasi tidak hanya dipandang sebagai seni yang dapat diaplikasikan, namun juga sebagai ilmu yang dapat dipelajari, dan sebagai lapangan kerja yang sangat menjanjikan. Komunikasi merupakan jalan tol dan

 $^{^{\}rm 1}$ Cangara, Hafied, 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 4

ORGANISASI PEMERINTAHAN

A. Pengertian Pemerintahan

Memahami definisi pemerintahan dapat dilihat dari beberapa konsep misalnya, pada kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu:

- 1. Ada dua pihak yang terlibat
- 2. Pihak pertama yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- 3. Pihak kedua, yang diperintah atau rakyat
- 4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. 21

Sedangkan Menurut Ndraha, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. ²² Sedangkan menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk

_

 $^{^{21}}$ Syafiie, Inu K. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 5

 $^{^{\}rm 22}$ Ndraha, Talizidhuhu. 2003. Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6

3

KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN

A. Pengertian Komunikasi Organisasi

Dalam memahami komunikasi organisasi, tidak terlepas dari peran manajemen yang berperan besar dalam rangka menciptakan hasil yang baik dan maksimal. Sebuah organisasi membutuhkan komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin yang memahami visi dan misi organisasinya akan berusaha menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi berbagai kalangan, baik komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke samping di dalam organisasinya. Bahkan melewati batas organisasi, yaitu dengan stake holder dan sebagainya. Mengelola hubungan melalui komunikasi yang efektif yang dilakukan anggota organisasi dengan lingkungannya, merupakan tindakan yang tepat.

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi yang terjadi terkait penelaahan atas banyak transaksi yang terjadi secara simultan. Sistem ini menyangkut penyampaian dan penafsiran pesan di antara lusinan bahkan ratusan individu yang memiliki jenis hubungan yang berlainan yang menghubungkan mereka. Dimana pikiran, keputusan dan perilakunya diatur oleh kebijakan, regulasi dan aturan; yang memiliki gaya dalam berkomunikasi; untuk mengelola dan memimpin; bahkan dimotivasi dan dipengaruhi iklim komunikasi yang berbeda serta jenis, bentuk dan metode

TATA KELOLA **PEMERINTAHAN** YANG BAIK

A. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi isu penting yang paling mengemuka dalam penguatan administrasi publik. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berusaha melaksanakan pembangunan berdasarkan harapan dan tuntutan atau aspirasi masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan public sebaik mungkin. Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.

Syamsuddin menjelaskan pemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal⁷³, yaitu:

- 1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituen atau pemilihnya, yaitu legitimasi akuntabilitas, otonomi dan devolusi kekuasaan kepada daerah, serta jaminan mekanisme kontrol oleh masyarakat.
- 2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

⁷³ Syamsuddin, Syamsiar. 2007. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang: Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV SOFA Mandiri dan Indonesia Print

5

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

A. Definisi Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi sebagai sarana utama dalam melakukan kegiatan dan kehidupan manusia sehari hari disebut juga sebagai kebudayaan. Komunikasi dalam suatu negara selain menggunakan Bahasa *negara* juga dipengaruhi oleh budaya yang ada dalam negara tersebut. Itu sebabnya dalam suatu peradaban sistem komunikasi suatu negara mengalami perubahan sesuai peradaban atau zaman yang disepakati oleh anggota pemerintahan dan masyarakatnya.

Menurut Sedarmayanti, komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, gagasan, isi pikiran/pernyataan, informasi dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat *penerima* informasi. Tetapi bisa berlaku sebaliknya. Namun pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab mempertimbangkan atau merespon sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.⁸⁵

Dalam komunikasi pemerintahan, terdapat dua tipe umum saluran *komunikasi*. Pertama, memudahkan komunikasi internal. Proses komunikasi birokratik internal ini memiliki tiga aspek, yaitu:

85 Sedarmayanti. 2018. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 179

6 MODEL KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

A. Pengertian Model Komunikasi

Komunikasi pemerintah dirumuskan sebagai proses penyampaian pesan/informasi di antara beberapa orang yang bekerja dalam instansi pemerintah dengan cara saling mentransmisikan informasi dan meng interpretasikan artinya. Dalam berkomunikasi, seseorang harus memiliki dasar yang akan menjadi patokan baginya dalam berkomunikasi dan di sinilah arti penting model komunikasi. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model akan membantu dalam mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang sesuatu yang akan diucapkan atau ditulis. Menurut B. Aubrey Fisher dalam Mulyana, model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan. 114

Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr. (Mulyana, 2008) menyatakan bahwa model berfungsi untuk membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena itu, hubungan antara model dan teori begitu erat. Model dapat berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat

¹¹⁴ Loc.cit., Deddy Mulyana, Ilmu..., 2008, hlm. 131.

7

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Kajian tentang desa dan segala problematika sosial, budaya, ekonomi dan berbagai perspektif lainnya, sudah banyak diulas oleh para ahli sosiologi terutama bila dilihat dalam perspektif geografis dan karakteristik masyarakatnya. Oleh sebab itu secara sederhana dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa sebenarnya desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 140

Berdasarkan Permendes RI Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

¹⁴⁰ Abd. Rasyid Masri, Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan (Cet. I; Makassar:

Alauddin University Press, 2014), h. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Surjadi, Pembangunan Masyarakat Desa (Cet. V : Bandung : Alumni, 1983), h. 21.
- A.A. Gondokusumo, Komunikasi Penugasan, Cet-ke-1, Jakarta: Gunung Agung, 2004, him 1.
- Abd. Rasyid Masri, Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan (Cet. I; Makassar:
- Abidin, Yusuf Zainal. 2016. Komunikasi Pemerintahan. Filosofi, Konsep dan Aplikasi. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Anggono, Dwi I: E-Government Indonesia Update 2015 2019 Ministry of communication and information technology the republic of Indonesia. 2015
- Arif, Mirrian Sjofyan. 2014. Hubungan Antara Administrasi, Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Universitas Terbuka, hal. 8
- Arni Muhammad, 2007. Komunikasi Organisasi, Cet-2, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 33.
- Cangara, Hafied, 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 4
- Cangara, Hafied, 2013. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 37-39
- Daniel Katz and Robert L. Kahn., The Psychology of Organization, New York: John Wiley & Sons, 1978, him. 440. 10)
- Effendy, Onong Uchjana, 1998. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung, Remaja Rosdakarya, hal. 60
- Effendy, Onong Uchjana, 2008. Dinamika Komunikasi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal. 17-19
- Effendy, Onong Uchjana. 2001. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 123.

- Elvinaro Ardianto dkk., Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Cet-1, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007, hlm. 68.
- Erma Candrasari, Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan,
 https://ermacandrasari.wordpress.com/2013/10/08/siste
 m-pemerintahan-desa-kelurahan-dan kecamatan/
- Fang Z: e-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development, International Journal of the Computer the Internet and Management 10(2) Hal 1-22. 2002
- Frederickson H. George, Administrasi Negara Baru, Cetakan Kedua, Alih Bahas Al-Ghozei Usman, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 52.
- Green Paper on Public Sector Reform dalam http://www.stlucia.gov.lc/ agencies/Public%20Sector%20Reform/green.html
- Hakim, Andi, Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Perspektif Yuridis dan Implementasi, Civil Service 10 .1, (Juni 2016) : 15-34
- Hasan, Erliana. (2010). Komunikasi Pemerintahan. Jakarta: Refika Aditama. hal. 8
- Hidayat, Syarif. Menimbang Ulang Konsep Good Governance. Jakarta. Pusat Penelitian Politik (LIPI) , 2016 (Desember): 126-133
- http://www.pu.go.id/itjen/buletin/3031otoda.html
- https://pakarkomunikasi.com/saluran-komunikasi-dalamorganisasi
- https://sdgs.bappenas.go.id/perpres-no-59-tahun-2017-tentang-sdgs-dan-tindak-lanjutnya/
- https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/06/153000769/bentuk-negara-dan-bentuk-pemerintahan-pengertian-dan-macamnya?page=all

- https://www.youtube.com/watch?v=BGqKJbkyx8c&t=89s
- J. Richard Stillman II. Public Administration "Concepts and Cases", Fifth Edition, U.S.A Houghton Mifflin Company, 1992, hlm. 251.
- John A. Pearce II and Richard B. Robinson, Jr., Management, Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1989, hlm. 162 dan Silalahi, Ulber. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Admnistrasi Publik, 3(1), 41.
- John B. Miner and Mary Green Miner, Personel and Industrial Relations, Fourth Edition, New York: McMillan Publishing Company, 1985, hlm. 621.
- John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 134.
- Judith R. Gordon, A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, Fourth Edition, Ale and Baco, 1993, hlm. 276
- Komarudin Sastradipoera, 2001, Manajemen Marketing, Suatu Pendekatan Ramuan Marketing, Bandung: Kappa-Sigma, hlm. 84.
- Labolo Muhadam, 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembanganya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 25-28
- Liliweri, Alo. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 78.
- Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi dan Komunikasi Organisasi. Jakaarta : Bumi Aksara
- Manaf, Abdul, 2016, Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik, KPK, Jakarta. Hal. 6
- Masmuh, Abdullah. 2010. Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. hal. 24-31

- Miftah Thoha, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Cet-ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 11.
- Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi, Cet-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 134.
- Mulyana, Dedy. 2014 Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 69-71
- Munaf, Yusri. 2015. Hukum Administrasi Negara. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing. hal. 47
- Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers, Managing by Communication: An Organizational Approach, New York: McGraw-Hill Book Company, 1982, hlm. 8.
- Napitupulu, Paimin. 2012. Pelayanan Publik & Customer Satisfaction. Bandung: Alumni. hal. 7
- Ndraha, Talizidhuhu. 2003. Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6
- Ningrat, Bayu Surya. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 11
- Nurudin. 2014. Sistem Komunikasi Indonesia. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 15-16
- Pace, R.Wayne dan Don.F.F. 2013. Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hal. 17
- Pamudji, Suparni. 1995. Ekologi Administrasi Negara, Jakarta: Bina Aksara, hal. 24
- Panjaitan, Doli T. M. R., and Piki D. K. Pardede. Administrasi Publik. Eureka Media Aksara, 2021. Hal. 160
- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. Psikologi Komunikasi. Bandung ; Rosdakarya, hal. 219.
- Richard C. Huseman, Business Communication, Rinehart and Winston, 1984, hlm. 28.

- Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Makassar : Alauddin University
- Rosadi Ruslan, Metode Penelitian PR dan Komunikasi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hal. 8
- Ruben, Brent D dan Lea P. Stewart. 2013. Communication and Human Behavior. United States: Allyn and Bacon. 328
- Ruliana, Poppy. 2016. Komunikasi Organisasi : Teori dan Studi Kasus. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 20-21
- Sasa Djuarsa Sendjaja, 2017. Teori Komunikasi edisi 3. Universitas Terbuka. Jakarta Pusat, hal. 19-21
- Sedarmayanti, 2018. Komunikasi Pemerintahan Cetakan Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siahaan, S.M. 1991. Komunikasi Pemahaman dan Penerapannya. Jakarta: BPK Gunung Mulia. hal. 3
- Simbolon dkk. 2022. Government Communication Model in Strengthening Village Institutions in Bertah Village, Tigapanah District, Karo Regency. http://jurnaliski.or.id/index.php/jkiski/issue/view/19
- Simbolon, B., & Khairifa, F. (2018). Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Wisata Tuktuk Siadong Kabupaten Samosir. Jurnal Darma Agung, 26(3), 606 - 619. Doi:10.46930/Ojsuda.V26i3.70
- Simbolon, B., & Panjaitan, D. (2019). Komunikasi Pemberdayaan Disnakerkoperindag Dalam Peningkatan Daya Saing Ekonomi Bangsa Berwawasan Gender Pada Petani Andaliman Di Kabupaten Samosir. Jurnal Darma Agung, 27(3), 1144–1158. Doi:10.46930/Ojsuda.V27i3.375
- Solekhan. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press. Hal. 63

- Stephen P. Robbins, Organizational Behaviour, New Jersey: Prentice Hall Publishing Inc. 2002, hlm. 243.
- Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tangerang: CV. Media Brilian.
- Sutaryo. 2010. Sosilogi Komunikasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran,
- Syafiie, Inu K. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 5
- Syamsuddin, Syamsiar. 2007. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang: Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV SOFA Mandiri dan Indonesia Print
- Taliziduhu Ndraha, Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2, Cet-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 17.
- Taufiqurokhman, 2016. Manajemen Strategi. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Prof. DR.Moestopo Beragama. hal. 15-16
- The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 63.

The United Nations has taken a leading role in reconceptualizing governance. In the UN's paradigm, governance is defined as "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs. It is the complex mechanisms, processes, relationships and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their rights and obligations and mediate their differences." Lihat Dennis A. Rondinelli Governments Serving People: The Changing Roles of Public Administration. Dalam Dennis A. Rondinelli. 2006. Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens. 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government 26-29 June 2007, Vienna, Austria. A United Nations Publication No.: ST/ESA/PAD/SER.E/ Printed in the United States of America, h. 6

- Ulber Silalahi, Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3. No. 1, 2004, hlm. 41.
- Untoro, Wisnu dan Halim, Abdul. 2007. Strategic Management in the Public Sector Organization: Publicness Implication on the Process and Dimension. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.7, No. 1, hal. 9
- William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, Edisi-1, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1998, hlm. 30.
- Wirawan. 2007. Budaya dan Iklim Organisasi, Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. hal. 117
- Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi-2, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 77

TENTANG PENULIS

Besti Rohana Simbolon, S.Sos, M.Si

Besti Rohana Simbolon, S.Sos, M.Si lahir di Besitang, Langkat tanggal 24 April 1975. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, Pendidikan S2 di Universitas Darma Agung Tahun 2015. Berprofesi sebagai Dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung Medan. Kegiatan lainnya sebagai pendamping mahasiswa dalam kegiatan Kampus Merdeka dan bagian dari Reviewer Proposal PT Program Praktisi Mengajar tahun 2022. Mengampuh mata kuliah Komunikasi Massa, Ilmu dan Praktek Jurnalistik, Komunikasi Budaya, Jurnalisme Multimedia dan Komunikasi Pemerintahan. Penulis aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah yang ada di daerah seperti di OJS Social Opinion, Governance Opinion, Talenta, Jurnal Darma Agung, Jurnal Network Media dan juga di Jurnal nasional lainnya. Selain itu pernah bergabung dengan penulis lainnya dalam Book Chapter Komunikasi Krisis Pemerintah Era Pandemi Covid-19 di Media Massa In : Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi Covid-19 oleh MBridge Press; Buku Manajemen media massa, ISBN: 9786236177488 oleh Scopindo Media Pustaka; Perempuan: perempuan dan media, ISBN: 9786232644250 oleh Syiah Kuala University Press

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.Ap, M.Ip

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP lahir di Kisaran pada tanggal 8 Februari 1988. Aktif sebagai Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung. Penulis menyelesaikan Pendidikan S-1 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung pada tahun 2010, menyelesaikan Pendidikan S-2 Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Darma Agung (UDA) Medan pada tahun 2017. Mengampu Mata Kuliah Administrasi Publik, Manajemen Admintrasi Publik, Teori-Teori Demokrasi dan Teori Birokrasi. Penulis aktif dalam mengajar dan menulis artikel di

beberapa Jurnal Ilmiah seperti Kohesi Science (2018), Darma Agung (2019), Governance Opinion (2019), Prointegrita (2020), Talenta (2020).

Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos. M.Si

Piki Darma Kristian Pardede lahir di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada 16 Desember 1994. Gelar kesarjanaannya (S1) diperoleh dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada tahun 2017, kemudian meraih gelar Magister (S2) Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2019. Aktif sebagai Dosen dan Peneliti dibidang kajian Ilmu Pemerintahan dan Adiministrasi Publik hingga menerbitkan beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain itu merupakan pendiri dari Centre for Public Policy and Local Governance Studies (PUBLIGO Centre), dan Ia fokus pada isu-isu Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, Pengarusutamaan Gender, Politik, Lingkungan, dan HAM. Penulis juga aktif menjadi peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSAKA) Sumut.